

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah terhadap pemanfaatan tanah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Izin pemanfaatan Tanah di Kecamatan Ngaglik sebagian besar adalah Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Pemanfaatan Tanah untuk lahan rumah tinggal. Perizinan yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah IPPT diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Dalam implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik, dipengaruhi adanya faktor-faktor:
 - a. Mekanis perizinan yang kurang berjalan dengan baik, kebanyakan pemohon izin kesulitan memenuhi kriteria persyaratan untuk perizinan agar keluarnya izin secara resmi.
 - b. Permasalahan yang sering terjadi pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan izin awalnya
 - c. Jika ada bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya atau fungsinya, Kecamatan Ngaglik hanya melaporkan dan

menghimbau ke Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah untuk menindaklanjuti memberikan sanksi kepada pelanggar.

- d. Standar harga tanah tidak berlaku dan patokan harga tanah tidak berlaku untuk tanah pribadi yang dimiliki perseorang.
- e. Permasalahan ekonomi, masyarakat yang kurang terjamin karena banyak mata pencarian masyarakat di Kecamatan Ngaglik yang masih mengandalkan dari pertanian,
- f. Pengawasan bidang pertanahan yang masih belum optimal
- g. Kurang tegas dalam pemberian sanksi,

2. Hambatan yang sering dihadapi dalam pemberian izin adalah hambatan terdapat dalam internal badan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusianya tidak sesuai dengan banyaknya permohonan izin yang masuk, sehingga banyak permohonan izin yang terkesannya lama prosesnya akibat dari kurangnya sumber daya manusia. Sistem perangkat yang mendukung yang belum memadai dengan tuntutan untuk kemudahan dalam informasi yang tanah dan pemanfaatan slim perizinan. Pemohon sering terhambat dalam hal masalah persyaratan administrasi yang terkait akan terpenuhi syarat ketentuan agar izin dapat di terima dan dikabulkan. Pemohon juga sering tidak mengetahui bagaimana proses alur mereka agar dapat memperoleh prosedur yang benar agar cepat memperoleh izin.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukkan

Penggunaan Tanah terhadap pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik antara lain:

- a. Perbaikan dalam internal instansi yang terkait dalam pelaksanaan regulasi dalam hal pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001
- b. Fungsi kedalam, fungsi keorganisasi lebih kepada penanganan berkas berkas perizinan agar bisa digunakan agar cepat, mudah dan tersimpan dengan baik
- c. Mengadakan sosialisasi dengan masyarakat untuk kesadaran penggunaan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya
- d. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan instansi yang terkait dalam bidang pemanfaatan tanah untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi pada pemanfaatan lahan
- e. Adanya kompensasi untuk daerah yang menjadi penyangga kawasan atas untuk daerah yang memanfaatkan, seperti antara Kabupaten Sleman yang berfungsi sebagai kawasan resapan air untuk daerah di bawahnya seperti Kabupaten Bantul, yang tergantung untuk cadangan air resapannya, maka paling tidak memberi kontribusi kepada Kabupaten Sleman

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran, untuk mengoptimal akan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah terhadap pemanfaatan tanah di

Kecamatan Ngaglik, maka perlu penataan ulang wilayah secara komprehensif, dengan melihat aspek budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Masih perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia di lembaga terkait supaya dapat melayani masyarakat secara optimal, serta masih perlunya peningkatan sarana yang mendukung proses pelayanan, dan perlunya ketegasan dari pemerintah bagi pelanggar peraturan. Perlunya peningkatan kerjasama antar pihak yang terkait baik masyarakat, aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan pemerintah kabupaten untuk konsisten dalam melaksanakan dan mengawasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alhalik (2006). Thesis “*Efektifitas Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah Sebagai Instrument Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*”.
- Ali Sofyan Husein. (1995). *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Arie Hutagalung dan Maskus Gunawan. (2008). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali Press
- Badan Bimas Ketahanan Pangan. (2004). *Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Jakarta: Departemen Pertanian
- Bambang Sunggono.(1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*: Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Winarno.(2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Burhan Bungin. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Eko Budiharjo. (1992). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni
- Muin, Fahmal. (2006). *Peran Asas Asas Umum Pemerintah yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta : UII Press
- Hadari Nawawi.(2002). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hessel Tangkilisan, Nogi S.(2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI

- I Nyoman Sumardiyati. (2010). *Sosiologi Pemerintahan-Dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Anggota IKAPI
- Johara T. Jayadinata. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Bandung: ITB
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2012). *Hukum Admitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (1998). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- . (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- . (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M.Irfan Islamy.(2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sanapiah Faisal.(1995). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Solichin Abdul Wahab. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
- Suharno.(2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press
- SuparnoSastra M. dan Endi Marlina.(2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI
- William N.Dunn.(1995). *Analisis Kebijakan Publik*. Yoyakarta: PT Hanindita Offset

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.2011.*Kebijakan Perizinan Pengembangan Perumahan Di Kabupaten Sleman ” Pengembangan Perumahan Di Kabupaten Sleman “*. Sleman :BPPD.

Paskarina, Caroline.dkk.(2007).*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*. Laporan Penelitian.Bandung : Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah. Universitas Padjadjaran.

Artikel dan Internet

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*”. Jurnal. Dikutip dari rudisalam.files.wordpress.com/.../artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc. pada 25 Juli 2013.

Nurharjadmo, Wahyu. (2008). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Jurnal Spririt Publ(ik Volume 4, Nomor 2 Halaman 215-228.

Buwono X.Hamengku. (2011).*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2010*. Yogyakarta: Pemda Propinsi DIY

Peran IMB Sebagai Instrumen Pengendali Menggunakan Lahan di

Kecamatan Ngaglik dalam http://rapidlibrary.com/files/laporan-hukum-dan-pranata-pembangunan-peran-imb-sebagai-instrumen-pengendali-penggunaan-lahan-di-kecamatan-ngaglik-kabupaten-sleman-doc_.html

Slemankab.*Permasalahan Pertanahan di Kabupaten*

Sleman<http://slim.slemankab.go.id/index.php/home/news/16> diakses pada tanggal 18 Agustus 2013.

Dokumen

Undang Undang Replublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Replublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang Undang Replublik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan
Perumahan

Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah,

Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001

Keputusan Bupati Sleman Nomor; 57/Kep.KDH/A/2006 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Dokumen Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011-
2031